

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)**

Nota Dinas

Nomor : 10138/Ses.1/05/2025

Yth. : 1. Inspektur
2. Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
3. Kepala Pusat Data dan Informasi
4. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
6. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
7. Plt. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
8. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
9. Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
10. Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital
11. Direktur Pasar Digital Pengadaan
12. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
13. Direktur Sertifikasi Profesi
14. Direktur Advokasi Pemerintah Pusat
15. Direktur Advokasi Pemerintah Daerah
16. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum

Dari : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Hal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode April Tahun 2025

Tanggal : 21 Mei 2025

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode bulan April Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, saat ini Rancangan Renstra LKPP Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renja LKPP Tahun 2025 sedang dalam tahap penyesuaian sehingga pelaporan kinerja LKPP sampai dengan April 2025 pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian Output berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja LKPP Tahun 2025.
2. Pada tahun 2025, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp166.711.994.000 dan sampai dengan bulan April 2025 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp35.181.188.475 (21.10%).
3. Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 beserta rincian nilai efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, nilai efisiensi anggaran LKPP adalah Rp49,578 M atau 29,75% dari pagu awal LKPP pada tahun 2025.
4. Nilai IKPA LKPP bulan April 2025 berdasarkan Aplikasi OMSPAN (spanint.kemenkeu.go.id) adalah sebesar 94,22.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan gabungan dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan bobot masing-masing indikator sebesar 50%. Mulai tahun 2024, pelaporan capaian Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi salah satu komponen penilaian pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran hanya dilaporkan setiap akhir tahun melalui aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan, oleh karena itu Nilai Kinerja



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

Anggaran LKPP belum dapat disajikan pada laporan bulanan periode April 2025.

6. Berkaitan dengan hal-hal diatas, untuk meningkatkan kinerja dan anggaran LKPP diharapkan setiap Unit Organisasi agar:
- Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran belanja pada setiap Unit Organisasi;
 - Menyampaikan usulan perubahan informasi kinerja tahun 2025 pasca efisiensi anggaran kepada Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$);
 - PIC Pelaporan setiap unit organisasi agar melaporkan capaian kinerja dan anggaran serta bukti dukung pada aplikasi SiREMON secara berkala;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan serta anggaran secara berkala di unit organisasi masing-masing.

Dalam hal membutuhkan penjelasan dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Sdri. Resa Anggriani (0819-3209-6526). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Edi Kristiyanto

Tembusan :

1. Sekretaris Utama
2. Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3. Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital
4. Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
5. Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

LAPORAN

MONITORING & EVALUASI KINERJA UNIT ORGANISASI



Periode Bulan April

**TAHUN
2025**

**BIRO PERENCANAAN
DAN KEUANGAN**

Gedung LKPP Lt 9
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B,
RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta



021-29935577
www.lkpp.go.id



SUMMARY

CAPAIAN FISIK LEMBAGA

Sasaran Kegiatan

25 | 87

Sasaran Kegiatan

Indikator



Rincian Output

64

Rincian Output



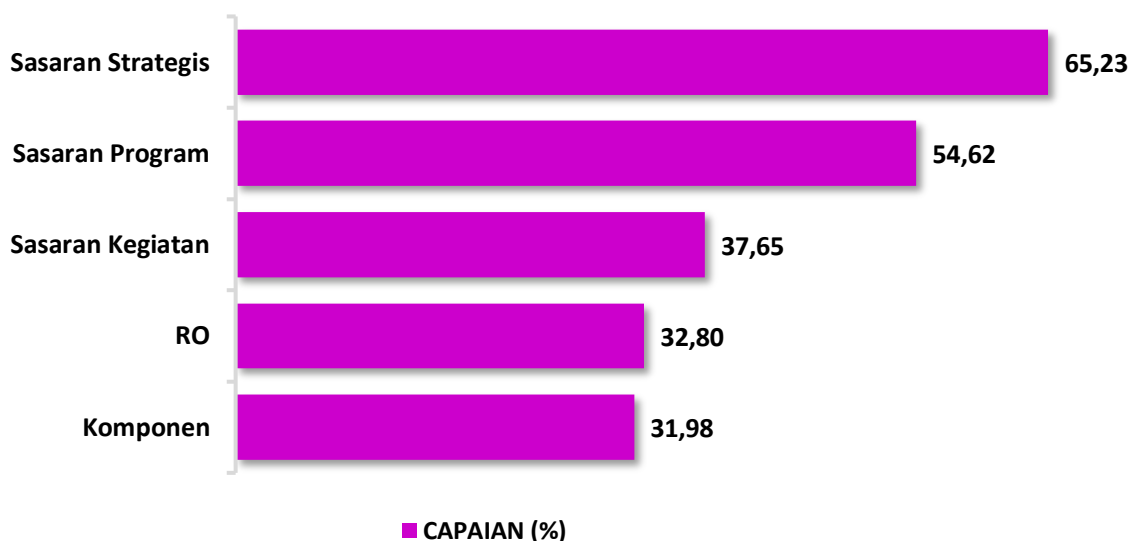
Komponen

171

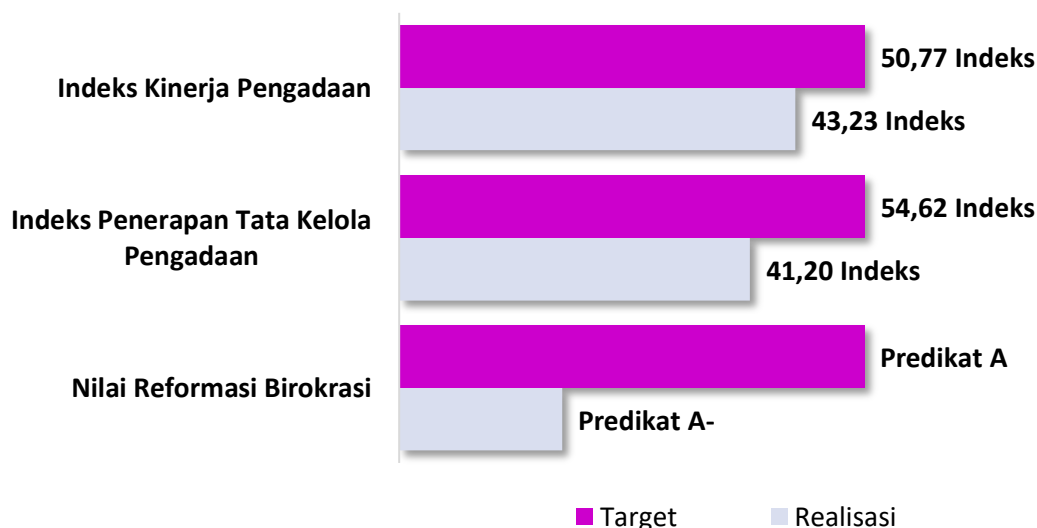
Komponen



Capaian Fisik



Sasaran Strategis





Catatan

“Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, saat ini Rancangan Renstra LKPP Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renja LKPP Tahun 2025 sedang dalam tahap penyesuaian pada aplikasi KRISNA, sehingga pelaporan kinerja LKPP sampai dengan Bulan April 2025 pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Rincian Output berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja LKPP Tahun 2025.”



SUMMARY

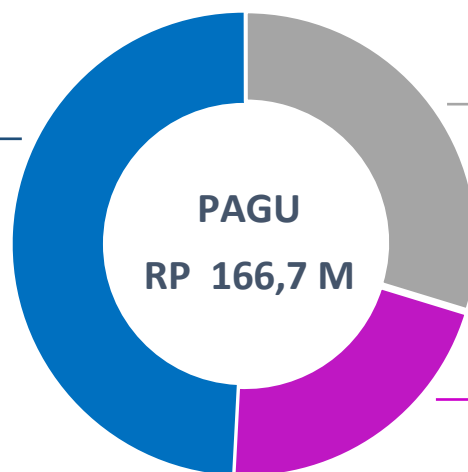
Penyerapan Anggaran



Realisasi Penyerapan Anggaran LKPP TA 2025 berdasarkan aplikasi MonSAKTI

Per tanggal 30 April 2025

Sisa Anggaran
Rp81.952.761.525
(49,16%)



Efisiensi Anggaran
Rp 49,578,044,000
(29,74%)

Penyerapan Anggaran
Rp35.181.188.475
(21,10%)

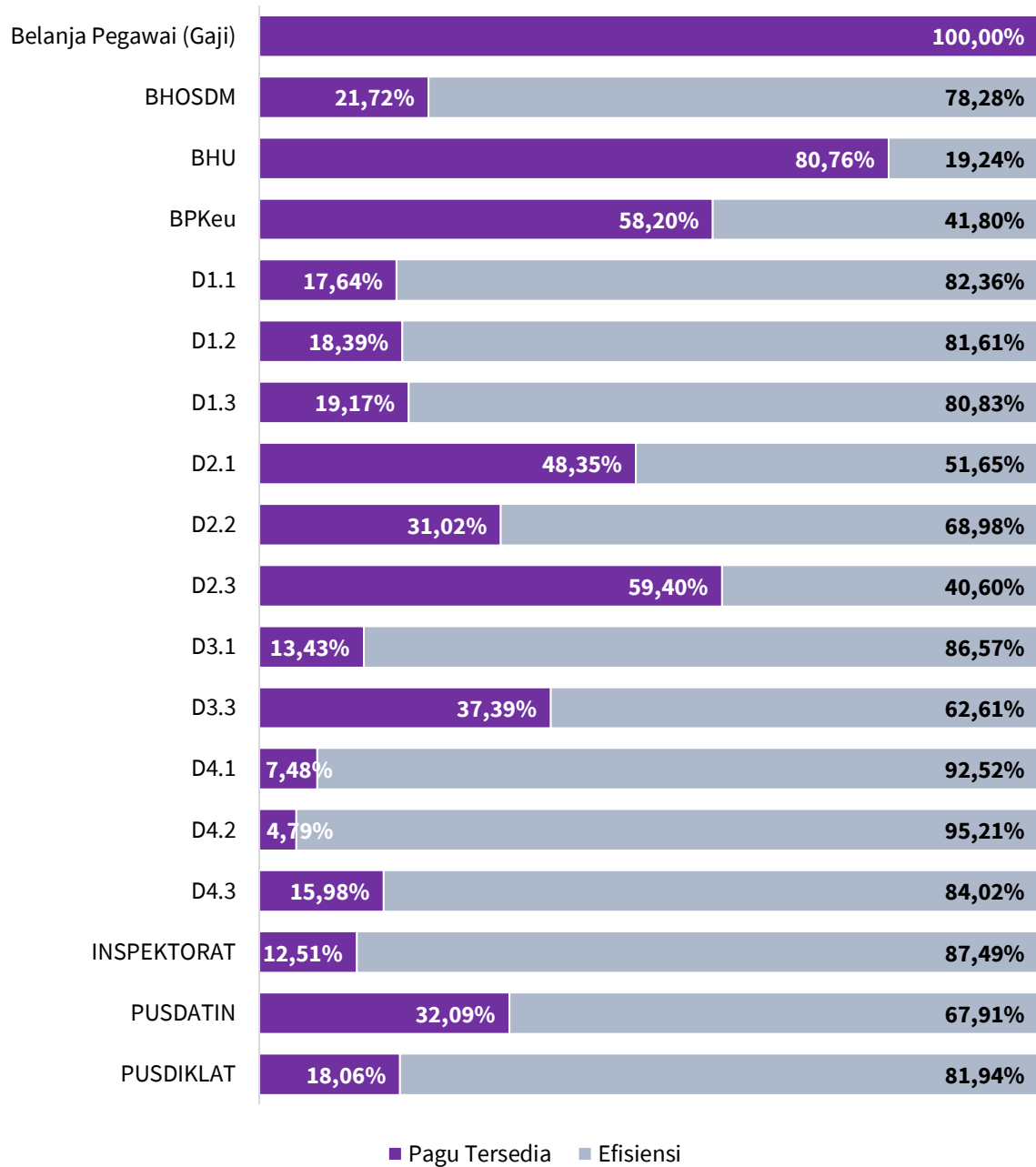
*Sumber: Aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan RI tanggal 30 April 2025

- Penyajian realisasi penyerapan anggaran LKPP dalam pelaporan ini masih menggunakan pagu awal sebesar Rp166.711.994.000, mengingat sampai saat ini belum terdapat kebijakan atas pengembalian pagu anggaran yang terkena dampak efisiensi



Pagu Anggaran dan Efisiensi Per Unit Organisasi Eselon II

Per tanggal 30 April 2025





Realisasi Anggaran Belanja Per Unit Organisasi Eselon II

Per tanggal 30 April 2025

Unit Organisasi	Pagu Awal (Rp)*	Efisiensi		Pagu Tersedia (Rp)	Realisasi		
		Nominal (Rp)	%		Nominal (Rp)	% (6 / 2)**	% (6 / 5)***
1	2	3	4	5	6	7	8
BHOSDM	5.742.195.000	4,494,841,000	78.28%	1,247,354,000	434.315.388	7,56%	34,82%
BHU	44.938.473.000	8,645,334,000	19.24%	36,293,139,000	8.573.397.218	19,08%	23,62%
BPKeu	2.814.109.000	1,176,325,000	41.80%	1,637,784,000	270.608.216	9,62%	16,52%
BPKeu (Gaji)	65.901.318.000	0	0%	65,901,318,000	21.046.972.571	31,94%	31,94%
D1.1	3.170.255.000	2,610,873,000	82.36%	559,382,000	246.887.633	7,79%	44,14%
D1.2	2.100.812.000	1,714,457,000	81.61%	386,355,000	113.262.173	5,39%	29,32%
D1.3	2.598.025.000	2,099,898,000	80.83%	498,127,000	151.332.153	5,82%	30,38%
D2.1	1.963.356.000	1,014,103,000	51.65%	949,253,000	353.958.000	18,03%	37,29%
D2.2	7.521.299.000	5,188,431,000	68.98%	2,332,868,000	1.029.137.496	13,68%	44,11%
D2.3	1.909.723.000	775,388,000	40.60%	1,134,335,000	393.002.870	20,58%	34,65%
D3.1	3.539.260.000	3,063,811,000	86.57%	475,449,000	181.497.935	5,13%	38,17%
D3.3	3.708.029.000	2,321,421,000	62.61%	1,386,608,000	505.595.120	13,64%	36,46%
D4.1	1.944.566.000	1,799,078,000	92.52%	145,488,000	68.780.871	3,54%	47,28%
D4.2	3.060.763.000	2,914,139,000	95.21%	146,624,000	50.819.082	1,66%	34,66%
D4.3	1.984.221.000	1,667,207,000	84.02%	317,014,000	137.311.116	6,92%	43,31%
INSPEKTORAT	927.860.000	811,811,000	87.49%	116,049,000	71.575.399	7,71%	61,68%
PUSDATIN	9.118.948.000	6,192,894,000	67.91%	2,926,054,000	1.305.376.537	14,31%	44,61%

Unit Organisasi	Pagu Awal (Rp)*	Efisiensi		Pagu Tersedia (Rp)	Realisasi		
		Nominal (Rp)	%		Nominal (Rp)	% (6 / 2)**	% (6 / 5)***
1	2	3	4	5	6	7	8
PUSLAT	3.768.782.000	3,088,033,000	81.94%	680,749,000	247.358.697	6,56%	36,34%
TOTAL	166.711.994.000	49,578,044,000	29.74%	117,133,950,000	35.181.188.475	21,10%	30,04%

Catatan:

- * Pagu anggaran berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk LKPP TA 2025 dengan Nomor: SP DIPA-106.01-0/2025 tanggal 02 Desember 2024.
- ** Persentase realisasi didapatkan berdasarkan perbandingan Realisasi Belanja Unit Organisasi (6) dengan Pagu Awal (2) LKPP.
- *** Persentase realisasi didapatkan berdasarkan perbandingan Realisasi Belanja Unit Organisasi (6) dengan Pagu Tersedia setelah Efisiensi (5).

Perbandingan Rencana Penarikan Dana (RPD) Dengan Realisasi Anggaran

No.	Unit Organisasi	RPD April (Rp)	Realisasi Anggaran April (Rp)	Deviasi (Rp)	% Deviasi*
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6 = (5 / 3)
1	BHOSDM	Rp106.328.000	Rp95.059.662	-Rp11.268.338	-10,60%
2	BHU	Rp3.071.642.915	Rp786.349.774	-Rp2.285.293.141	-74,40%
3	BPKEU	Rp48.300.000	Rp46.650.000	-Rp1.650.000	-3,42%
4	BPKEU (Belanja Pegawai)	Rp4.776.008.066	Rp4.737.029.422	-Rp38.978.644	-0,82%
5	D1.1	Rp32.300.000	Rp32.300.000	Rp-	0,00%
6	D1.2	Rp24.900.000	Rp24.900.000	Rp-	0,00%
7	D1.3	Rp30.509.000	Rp24.494.000	-Rp6.015.000	-19,72%
8	D2.1	Rp80.781.000	Rp67.240.000	-Rp13.541.000	-16,76%
9	D2.2	Rp79.215.000	Rp256.360.000	Rp177.145.000	223,63%
10	D2.3	Rp260.760.504	Rp85.771.500	-Rp174.989.004	-67,11%
11	D3.1	Rp34.878.000	Rp31.228.000	-Rp3.650.000	-10,47%
12	D3.3	Rp99.691.781	Rp87.168.750	-Rp12.523.031	-12,56%
13	D4.1	Rp5.775.495	Rp5.775.495	Rp-	0,00%
14	D4.2	Rp6.225.500	Rp6.225.500	Rp-	0,00%
15	D4.3	Rp24.088.000	Rp24.088.000	Rp-	0,00%
16	Inspektorat	Rp11.212.000	Rp11.212.000	Rp-	0,00%
17	PUSDATIN	Rp96.257.300	Rp96.257.300	Rp-	0,00%
18	PPSDM PBJ	Rp46.450.000	Rp34.165.383	-Rp12.284.617	-26,45%
TOTAL LKPP		Rp8.835.322.561	Rp6.452.274.786	-Rp2.383.047.775	-26,97%

Catatan:

- * 1. Ambang batas deviasi antara RPD dengan realisasi adalah sebesar $\pm 5\%$ untuk nilai maksimum IKPA LKPP;
 - 2. Kinerja Unit Organisasi semakin baik bila Persentase Deviasi antara RPD dengan Realisasi Anggaran mendekati 0%.
 - 3. Persentase Deviasi bernilai positif (+) jika Realisasi Anggaran lebih besar dari RPD
 - 4. Persentase Deviasi bernilai negatif (-) jika Realisasi Anggaran lebih kecil dari RPD
 - 5. RPD (3) dan Realisasi Anggaran (4) yang ditampilkan merupakan RPD dan penyerapan anggaran parsial bulan April tahun 2024
- Realisasi anggaran diluar ambang batas toleransi deviasi sebesar $\pm 5\%$
■ Realisasi anggaran masih dalam ambang batas toleransi deviasi sebesar $\pm 5\%$

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	9
BAB I	12
MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA	12
1.1 ANGGARAN.....	12
A. Pagu Anggaran	12
B. Efisiensi Anggaran.....	13
C. Anggaran Pasca Efisiensi.....	14
D. Penyerapan Anggaran	18
1.2 PELAPORAN EKSTERNAL	19
A. Pelaporan Kinerja pada E-Monev BAPPENAS	19
BAB II	21
MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI	21
2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)	21
A. Capaian Kinerja Fisik	21
B. Capaian Kinerja Anggaran	22
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	22
D. Rekomendasi.....	23
2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)	24
A. Capaian Kinerja Fisik	24
B. Capaian Kinerja Anggaran	25
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	25
D. Rekomendasi.....	25
2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)	27
A. Capaian Kinerja Fisik	27
B. Capaian Kinerja Anggaran	28
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	28
D. Rekomendasi.....	29
2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)	30
A. Capaian Kinerja Fisik	30
B. Capaian Kinerja Anggaran	31
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	31
D. Rekomendasi.....	31
2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)	33

A.	Capaian Kinerja Fisik	33
B.	Capaian Kinerja Anggaran	34
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	34
D.	Rekomendasi	34
2.6	DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)	36
A.	Capaian Kinerja Fisik	36
B.	Capaian Kinerja Anggaran	37
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	37
D.	Rekomendasi	38
2.7	DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)	39
A.	Capaian Kinerja Fisik	39
B.	Capaian Kinerja Anggaran	40
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	40
D.	Rekomendasi	41
2.8	DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)	42
A.	Capaian Kinerja Fisik	42
B.	Capaian Kinerja Anggaran	42
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	43
D.	Rekomendasi	43
2.9	DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)	44
A.	Capaian Kinerja Fisik	44
B.	Capaian Kinerja Anggaran	44
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	45
D.	Rekomendasi	45
2.10	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)	47
A.	Capaian Kinerja Fisik	47
B.	Capaian Kinerja Anggaran	48
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	48
D.	Rekomendasi	49
2.11	DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3)	50
A.	Capaian Kinerja Fisik	50
B.	Capaian Kinerja Anggaran	51
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi	51

D. Rekomendasi.....	51
2.12 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1)	53
A. Capaian Kinerja Fisik	53
B. Capaian Kinerja Anggaran	54
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	54
D. Rekomendasi.....	55
2.13 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2)	56
A. Capaian Kinerja Fisik	56
B. Capaian Kinerja Anggaran	57
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	57
D. Rekomendasi.....	58
2.14 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3).....	59
A. Capaian Kinerja Fisik	59
B. Capaian Kinerja Anggaran	60
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	60
D. Rekomendasi.....	61
2.15 INSPEKTORAT	62
A. Capaian Kinerja Fisik	62
B. Capaian Kinerja Anggaran	62
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	63
D. Rekomendasi.....	63
2.16 PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA	65
A. Capaian Kinerja Fisik	65
B. Capaian Kinerja Anggaran	66
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	66
D. Rekomendasi.....	66
2.17 PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)	68
A. Capaian Kinerja Fisik	68
B. Capaian Kinerja Anggaran	69
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	69
D. Rekomendasi.....	70
BAB III	72
KESIMPULAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Rekomendasi.....	73

BAB I MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA

1.1 ANGGARAN

A. Pagu Anggaran

Berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk LKPP TA 2025 dengan Nomor: SP DIPA-106.01-0/2025 tanggal 02 Desember 2024, pagu anggaran LKPP tahun 2025 sebesar Rp166.711.994.000. Adapun komposisi anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
51 Belanja Pegawai	65.901.318.000	39,53%
52 Belanja Barang	98.714.391.000	59,21%
53 Belanja Modal	2.096.285.000	1,26%
TOTAL	166.711.994.000	100%

Adapun pembagian pagu anggaran tersebut ke Unit Organisasi adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	51 Belanja Pegawai (Rp)	52 Belanja Barang (Rp)	53 Belanja Modal (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
SETTAMA	65.901.318.000	53.319.777.000	175.000.000	119.396.095.000
BHOSDM	-	5.682.195.000	60.000.000	5.742.195.000
BPKeu	-	2.814.109.000	-	68.715.427.000
BHU	-	44.823.473.000	115.000.000	44.938.473.000
BPKeu (Belanja Pegawai)	65.901.318.000	-	-	65.901.318.000
Kedeputian 1 (D1)	-	7.869.092.000	-	7.869.092.000
D1.1	-	3.170.255.000	-	3.170.255.000
D1.2	-	2.100.812.000	-	2.100.812.000
D1.3	-	2.598.025.000	-	2.598.025.000
Kedeputian 2 (D2)	-	11.394.378.000	-	11.394.378.000
D2.1	-	1.963.356.000	-	1.963.356.000
D2.2	-	7.521.299.000	-	7.521.299.000
D2.3	-	1.909.723.000	-	1.909.723.000
Kedeputian 3 (D3)	-	7.247.289.000	-	7.247.289.000
D3.1	-	3.539.260.000	-	3.539.260.000
D3.3	-	3.708.029.000	-	3.708.029.000
Kedeputian 4 (D4)	-	6.918.050.000	71.500.000	6.989.550.000
D4.1	-	1.944.566.000	-	1.944.566.000
D4.2	-	2.989.263.000	71.500.000	3.060.763.000
D4.3	-	1.984.221.000	-	1.984.221.000
INSPEKTORAT	-	927.860.000	-	927.860.000
PUSLAT	-	3.295.782.000	473.000.000	3.768.782.000

Unit Organisasi	51 Belanja Pegawai (Rp)	52 Belanja Barang (Rp)	53 Belanja Modal (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
PUSDATIN	-	7.742.163.000	1.376.785.000	9.118.948.000
TOTAL	65.901.318.000	98.714.391.000	2.096.285.000	166.711.994.000

B. Efisiensi Anggaran

Pada Tahun 2025, terdapat kebijakan nasional yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres Nomor 1 Tahun 2025) yang mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk melakukan Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Sesuai Besaran yang ditetapkan Menteri Keuangan. Lebih lanjut, efisiensi anggaran LKPP didasarkan pada:

- 1) Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 Perihal Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- 2) Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- 3) Penyampaian Rincian Nilai Efisiensi Anggaran Melalui *One on One Meeting* bersama DJA dan DJPB.

Berdasarkan dinamika tersebut, anggaran efisiensi LKPP adalah sebesar Rp49,578 M atau 29,75% dari pagu awal LKPP sebesar Rp166,71 M dengan rincian sebagai berikut:

Program	Pagu Awal (Rp)	Efisiensi (Rp)	Pagu Tersedia (Rp)
106.01.CJ Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	37.269.091.000	28.413.061.000	8.856.040.000
106.01.WA Program Dukungan Manajemen	129.442.903.000	21.164.983.000	108.277.920.000
TOTAL	166.711.944.000	49.578.044.000 (29,75%)	117.133.960.000 (70,25%)

Namun demikian mengingat sampai dengan saat ini masih belum terdapat kebijakan terkait dengan pengembalian atas pagu anggaran yang diefisiensikan, maka penyampaian

pelaporan kinerja dan anggaran pada bulan April 2025 masih menggunakan pagu awal sebesar Rp166.711.944.

C. Anggaran Pasca Efisiensi

1. Penyesuaian Anggaran Pasca Efisiensi

Pada bulan Februari 2025, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029. Dalam Lampiran III Perpres 12 Tahun 2025, LKPP mengampu pencapaian 2 (dua) Indikator Kegiatan Prioritas yaitu KP 07.08.02 Nilai Kinerja Pengadaan dan KP 07.08.02 Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan. Pada Tahun 2025 terdapat 13 (tiga belas) Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) untuk mendukung pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas tersebut.

Adanya kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, terdapat potensi dampak efisiensi anggaran terhadap pencapaian RO PN. Saat ini pagu tersedia untuk 13 (tiga belas) RO PN hanya tersedia sebesar Rp1.400.866.000 dengan postur anggaran sebagai berikut:

No	RO Prioritas Nasional	Pagu Semula (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)
1	6323.QDG.111 Penyedia UMK yang <i>On Boarding</i> dalam Sistem Pengadaan Digital	440.000.000	440.000.000	00
2	6319.UBB.121 Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	1.200.000.000	1.200.000.000	00
3	6319.PAH.131 Rancangan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/ Berkelanjutan	140.639.000	140.639.000	00
4	6319.PDA.131 Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah	337.237.000	327.017.000	10.220.000
5	6319.PEC.131 Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/	668.974.000	491.869.000	177.105.000

No	RO Prioritas Nasional	Pagu Semula (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)
	organisasi internasional /lembaga internasional			
6	6319.QDB.131 K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan	366.449.000	366.449.000	00
7	6323.QDC.131 Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional	364.869.000	264.638.000	100.231.000
8	6323.QDG.131 Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	719.857.000	545.361.000	174.496.000
9	6321.PDE.311 UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3	2.754.381.000	2.518.398.000	235.983.000
10	6321.PDH.311 SDM PBJ dan Non-JF PBJ	554.817.000	416.605.000	138.212.000
11	6321.SCF.511 Peserta pelatihan anti korupsi PBJ	450.000.000	321.312.000	128.688.000
12	6322.UAI.431 K/L/Pemda yang Terbangun Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan	269.782.000	247.560.000	22.222.000
13	6320.UAB.231 Sistem Pasar <i>Digital</i> Pengadaan Terintegrasi	1.000.000.000	586.291.000	413.709.000
TOTAL		9,267,005,000	7.866.139.000	1.400.866.000

Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan anggaran RO PN untuk ketercapaian output baik secara kualitas maupun kuantitas, LKPP telah mengirimkan Surat Permohonan Relaksasi Efisiensi Anggaran Untuk Pencapaian Target Rincian Output Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 melalui surat nomor 6162/KA/03/2025 tanggal 18 Maret 2025, dimana LKPP mengajukan permohonan relaksasi atas blokir efisiensi anggaran RO PN yaitu sebesar Rp7,866,139,000,-

Selanjutnya, di samping mengusulkan relaksasi blokir atas seluruh anggaran PN di atas, LKPP juga mempertimbangkan anggaran efektif pasca efisiensi, dimana terdapat 4 (empat) RO PN yang saat ini tidak tersedia anggarannya (pagu efektif Rp0,-). Hal ini berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas pencapaian RO PN dan bahkan tidak dapat tercapai pada 4 RO PN tersebut. Adapun 4 (empat) RO PN tersebut adalah sebagai berikut:

- 6319.PAH.131 - Rancangan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan,
- 6319.QDB.131 - K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/berkelanjutan,
- 6319.UBB.121 - Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2,
- 6323.QDG.111 - Penyedia UMK yang *Onboarding* dalam Sistem Pengadaan Digital.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dalam rangka mengupayakan pencapaian target output RO PN, dilakukan penyesuaian anggaran melalui tukar *tagging* blokir efisiensi dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk ketercapaian *output* minimal (baik secara kuantitas dan kualitas) untuk 4 RO PN yang saat ini anggaran efektifnya Rp0,- (nol).

Melalui surat Sekretaris Utama LKPP Nomor 6714/SES/03/2025 tanggal 26 Maret 2025 perihal Usulan Revisi Anggaran, dilakukan penyesuaian anggaran sehingga komposisi efisiensi menjadi sebagai berikut:

Program		Efisiensi Awal (Rp)	Efisiensi Penyesuaian (Rp)	Perubahan (Rp)
106.01.CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	28.413.061.000	28.256.839.000	(156.222.000)
106.01.WA	Program Dukungan Manajemen	21.164.983.000	21.321.205.000	156.222.000
TOTAL		49.578.044.000	49.578.044.000	0

Adapun postur anggaran LKPP setelah penyesuaian efisiensi tersebut adalah sebagai berikut:

Program		Pagu Awal (Rp)	Efisiensi (Rp)	Pagu Tersedia (Rp)
106.01.CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	37.269.091.000	28.256.839.000	9.012.252.000
106.01.WA	Program Dukungan Manajemen	129.442.903.000	21.321.205.000	108.121.698.000

Program	Pagu Awal (Rp)	Efisiensi (Rp)	Pagu Tersedia (Rp)
TOTAL	166.711.944.000	49.578.044.000 (29,75%)	117.133.960.000 (70,25%)

2. Pemanfaatan Anggaran Konsolidasi Pasca Efisiensi

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang menetapkan LKPP secara keseluruhan mendapatkan efisiensi belanja sebesar Rp45.578.044.000,-, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Nota Dinas Nomor 5975/KPA/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 Perihal Pemanfaatan Anggaran Konsolidasi Selama Masa Efisiensi.

Melalui nota dinas tersebut, disampaikan beberapa hal terkait pemanfaatan anggaran efektif pasca efisiensi yang dipusatkan/dikonsolidasikan di lingkup Unit Organisasi di bawah Sekretariat Utama. Anggaran yang dikonsolidasikan bersifat bersama dan dapat digunakan oleh Seluruh Unit Organisasi di LKPP dengan syarat memperoleh **persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** dengan memperhatikan **prinsip efisiensi serta Prioritas Nasional**. Pemanfaatan anggaran tersebut dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Ketentuan
1	Perjalanan Dinas	Prioritas: Program Prioritas Nasional, kegiatan dihadiri oleh Kepala LKPP dan/atau Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi madya yang melibatkan pihak luar - Staf pendukung: memperhatikan prinsip efisiensi anggaran. - Usulan wajib disertai KAK, rincian anggaran, dan formulir persetujuan KPA. - Jika dibiayai anggaran pihak luar: mengikuti ketentuan biaya dan daftar peserta dari pihak tersebut.
2	Paket Meeting Dalam Kota	- Prioritas: Sama dengan perjalanan dinas. - Peserta: Hanya yang terlibat langsung dalam kegiatan. - Usulan wajib dengan KAK, rincian anggaran, dan formulir persetujuan KPA.
3	Jasa Lainnya	- Unit Organisasi tidak melakukan penambahan personil baru. - Unit Organisasi mengusulkan penambahan personil Jasa Lainnya dikarenakan berakhirnya masa kontrak/pengunduran diri dihimbau tidak melakukan penggantian atas personil tersebut, kecuali ada kebutuhan mendesak dan mendapatkan persetujuan KPA. - Perubahan kontrak yang menambah anggaran wajib pertimbangkan ketersediaan anggaran dan persetujuan KPA

No	Jenis Belanja	Ketentuan
4	Belanja Bahan	- Jamuan rapat hanya untuk kegiatan prioritas nasional dan dihadiri Kepala LKPP dan/atau Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Madya yang melibatkan pihak luar. - Usulan harus disertai jumlah peserta dan persetujuan KPA. - Didorong <i>paperless</i> guna mendukung efisiensi belanja ATK.
5	Belanja Jasa Profesi	- Usulan disertai KAK, rincian anggaran, harus mendapatkan persetujuan KPA dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran masing-masing unit.
6	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Usulan pembelian disertai perencanaan kebutuhan serta disetujui oleh KPA

D. Penyerapan Anggaran

Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan 30 April 2025 penyerapan anggaran LKPP adalah sebesar Rp35.181.188.475 atau sebesar 21,10%. Adapun rincian penyerapan anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

- Penyerapan per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	65.901.318.000	21.046.972.571	31,94%	44.854.345.429
52 Belanja Barang	98.714.391.000	14.069.142.154	14,25%	84.645.248.846
53 Belanja Modal	2.096.285.000	65.073.750	3,10%	2.031.211.250
Total	166.711.994.000	35.181.188.475	21,10%	131.530.805.525

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
SES (Gaji)	Rp65.901.318.000	Rp21.046.972.571	31,94%	Rp44.854.345.429
SES	Rp53.494.777.000	Rp9.278.320.822	17,34%	Rp44.216.456.178
D2	Rp11.394.378.000	Rp1.776.098.366	15,59%	Rp9.618.279.634
PUSDATIN	Rp9.118.948.000	Rp1.305.376.537	14,31%	Rp7.813.571.463
D3	Rp7.247.289.000	Rp687.093.055	9,48%	Rp6.560.195.945
INSPEKTORAT	Rp927.860.000	Rp71.575.399	7,71%	Rp856.284.601
PUSLAT	Rp3.768.782.000	Rp247.358.697	6,56%	Rp3.521.423.303
D1	Rp7.869.092.000	Rp511.481.959	6,50%	Rp7.357.610.041

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
D4	Rp6.989.550.000	Rp256.911.069	3,68%	Rp6.732.638.931
TOTAL	Rp166.711.994.000	Rp35.181.188.475	21,10%	Rp131.530.805.525

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
BHOSDM	Rp5.742.195.000	Rp434.315.388	7,56%	Rp5.307.879.612
BHU	Rp44.938.473.000	Rp8.573.397.218	19,08%	Rp36.365.075.782
BPKeu	Rp2.814.109.000	Rp270.608.216	9,62%	Rp2.543.500.784
BPKeu (Gaji)	Rp65.901.318.000	Rp21.046.972.571	31,94%	Rp44.854.345.429
D1.1	Rp3.170.255.000	Rp246.887.633	7,79%	Rp2.923.367.367
D1.2	Rp2.100.812.000	Rp113.262.173	5,39%	Rp1.987.549.827
D1.3	Rp2.598.025.000	Rp151.332.153	5,82%	Rp2.446.692.847
D2.1	Rp1.963.356.000	Rp353.958.000	18,03%	Rp1.609.398.000
D2.2	Rp7.521.299.000	Rp1.029.137.496	13,68%	Rp6.492.161.504
D2.3	Rp1.909.723.000	Rp393.002.870	20,58%	Rp1.516.720.130
D3.1	Rp3.539.260.000	Rp181.497.935	5,13%	Rp3.357.762.065
D3.3	Rp3.708.029.000	Rp505.595.120	13,64%	Rp3.202.433.880
D4.1	Rp1.944.566.000	Rp68.780.871	3,54%	Rp1.875.785.129
D4.2	Rp3.060.763.000	Rp50.819.082	1,66%	Rp3.009.943.918
D4.3	Rp1.984.221.000	Rp137.311.116	6,92%	Rp1.846.909.884
INSPEKTORAT	Rp927.860.000	Rp71.575.399	7,71%	Rp856.284.601
PUSDATIN	Rp9.118.948.000	Rp1.305.376.537	14,31%	Rp7.813.571.463
PUSLAT	Rp3.768.782.000	Rp247.358.697	6,56%	Rp3.521.423.303
TOTAL	Rp166.711.994.000	Rp35.181.188.475	21,10%	Rp131.530.805.525

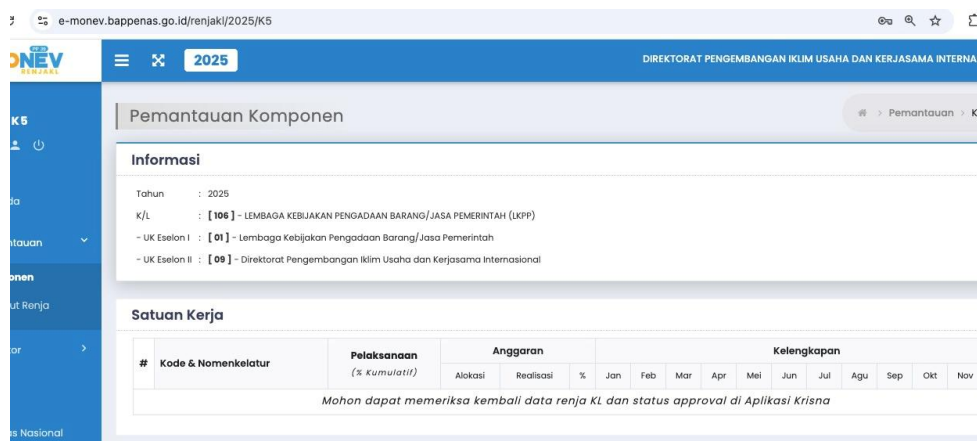
1.2 PELAPORAN EKSTERNAL

A. Pelaporan Kinerja pada E-Monev BAPPENAS

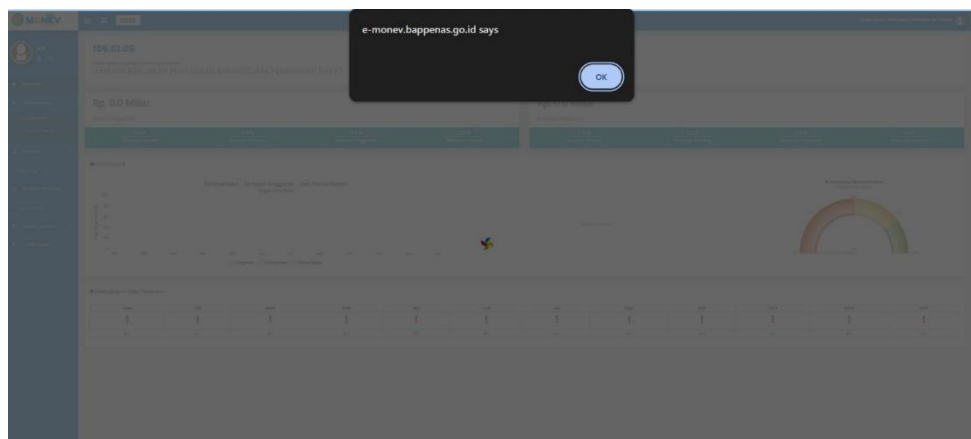
Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga perlu melaksanakan pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui E-monev Bappenas.

Pengumpulan data pada aplikasi ini adalah rutin setiap bulannya. Setiap K/L/PD diharapkan dapat melaporkan kinerjanya melalui e-monev bappenas setiap bulan. Petunjuk pengisian e-monev bappenas dapat dilihat melalui tautan https://emonev.bappenas.go.id/fe/panduan/2021/Pedoman-eMonev_2021_v1_19032021.pdf.

Sampai dengan laporan ini disusun, realisasi dan progres kinerja belum dapat seluruhnya dilaporkan pada aplikasi e-monev Bappenas untuk periode kinerja Januari s.d Maret 2025 dikarenakan masih dijumpai beberapa *bugs* dan *error* aplikasi serta belum dibukanya akses pelaporan kinerja bulan April 2025 dengan tangkapan layar aplikasi e-monev seperti dibawah ini.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi E-Monev Bappenas



Gambar 2. Tampilan Error pada Aplikasi E-Monev Bappenas

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI

Sampai dengan bulan April 2025, kinerja LKPP pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian Output berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja LKPP Tahun 2025. Namun, masih terdapat dinamika perubahan seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran. Atas dinamika tersebut, dokumen Rencana Strategis (Renstra) LKPP tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) LKPP tahun 2025 masih dalam proses penyempurnaan, seperti perubahan dan/atau penyesuaian nomenklatur, target maupun satuan kinerja.

2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan (BPKeu) memiliki 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 4 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01- Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran	Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Predikat: Sangat Baik	Predikat: Sangat Baik
		Indeks maturitas SPIP	Predikat: Level 3	Progres: 38%
		Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Predikat: Baik	Progres: 75%
		Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi pada pengelolaan keuangan	5 Persen	Progres: 50%

■ Target telah tercapai

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6599.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 33,33%

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/Progres
2	6599.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6 Dokumen	Progres: 28%
3	6599.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	Progres: 30%
4	6599.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	17 Dokumen	Progres: 25%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan April 2025 adalah 27%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan April 2025 adalah 31,59%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar Rp68.715.427.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025, penyerapan per jenis belanja pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	65.901.318.000	21.046.972.571	31.94%	44.854.345.429
52 Belanja Barang	2.814.109.000	270.608.216	9.62%	2.543.500.784
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	68.715.427.000	21.317.580.787	31.02%	47.397.846.213

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHOSDM di bulan April 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir efisiensi pada BPKeu sebesar Rp 1.020.103.000 atau 1,5%.
2. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp46.650.000,-. Realisasi ini lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp48.300.000,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp1.650.000,- atau -3,42%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Guna tetap meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga khususnya dalam penyerapan anggaran, BPKeu mengkoordinasikan seluruh unit organisasi agar terus memperhatikan delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM) memiliki 6 Indikator Kinerja Kegiatan dan 4 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	01-Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	Predikat: Baik	Progres: 20%
		Indeks Reformasi Hukum	Predikat: Istimewa	Progres: 20%
		Skor komposit evaluasi kelembagaan	Skor: 77	Progres: 36%
		Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	100 Persen	Progres: 28%
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP	100 Persen	Progres: 35.11%
		Indeks berAKHLAK	Predikat: Cukup Sehat	Progres: 10%
		Indeks sistem merit	Predikat: Baik	Progres: 10%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	6598.EBA.957	Layanan Hukum	1 Layanan	Progres: 28.33%
2	6598.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3 Layanan	Progres: 36%
3	6598.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	Progres: 36.84%
4	6598.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3 Layanan	Progres: 41.41%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia pada bulan April 2025 adalah 35,65%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia pada bulan April 2025 adalah 36,95%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran BHOSDM adalah sebesar Rp5.742.195.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHOSDM sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	5.682.195.000	434.315.388	7.64 %	5.247.879.612
53 Belanja Modal	60.000.000	-	0%	60.000.000
Total	5.742.195.000	434.315.388	7.56 %	5.307.879.612

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHOSDM di bulan April 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target pasca efisiensi yaitu RO – Layanan Bantuan Hukum
2. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp95.059.662,-. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp106.328.000,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp11.268.338 atau -10,60%.
3. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir efisiensi pada BHOSDM sebesar Rp Rp4.494.841.000 atau 78,28%
4. Terdapat 1 (satu) Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Indeks BerAKHLAK dihapuskan karena Kementerian PANRB tidak melaksanakan penilaian Indeks BerAKHLAK untuk Tahun 2025.
5. Terdapat informasi informal dari BKN bahwa untuk tahun 2025 penilaian sistem merit seluruh instansi ditunda karena sedang mempersiapkan kriteria penilaian sistem merit yang baru.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang

telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

4. Mengonfirmasi kembali target atas indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) yang ditiadakan tahun 2025 kepada Biro Perencanaan dan Keuangan, yaitu:
 - a. Indeks BerAKHLAK
 - b. Indeks Sistem Merit
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum (BHU) memiliki 7 Indikator Kinerja Kegiatan dan 6 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	01-Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik	Predikat: Baik	Progres: 0%
		Indeks keterbukaan informasi publik	Predikat: Menuju Informatif	Progres: 0%
		Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM	Predikat: Tersedia	Progres: 0%
2.	02-Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal	Hasil pengawasan kearsipan	Predikat: Memuaskan	Progres: 35%
		Indeks tata kelola pengadaan	Predikat: Sangat Baik	Progres: 33.33%
		Indeks pengelolaan aset	Indeks 3,35	Progres: 33.33%
		Indeks layanan penyelenggaraan ketatausahaan	Predikat: Baik	Progres: 35%
		Indeks layanan keprotokolan	Predikat: Baik	Progres: 25%
		Indeks Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kerumahtanggaan	Predikat: Memuaskan	Progres: 25%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi
1	6600.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	1	Progres: 33%
2	6600.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	6	Progres: 28.34%
3	6600.EBA.959	Layanan Protokoler	Layanan	1	Progres: 33.79%

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi
4	6600.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	Progres: 35%
5	6600.EBC.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	Progres: 57.09%
6	6600.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	1	Progres: 35%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada bulan April 2025 adalah 37,04%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada bulan April 2025 adalah 33,37%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran BHU adalah sebesar Rp 44.938.473.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHU sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	44.823.473.000	8.508.323.468	18.98%	36.315.149.532
53 Belanja Modal	115.000.000	65.073.750	56.59%	49.926.250
Total	44.938.473.000	8.573.397.218	19.08%	36.365.075.782

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHU di bulan April 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK - Indeks pelayanan publik
 - b. IKSK – Hasil pengawasan kearsipan
2. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp786.349.774. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp3.071.642.915 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp2.285.293.141 atau -74,40%.
3. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir efisiensi pada BHU sebesar Rp Rp8.645.334.000 atau 19,24% dari pagu awal.

4. Pada RO- Layanan BMN komponen 053-Penyusunan laporan BMN di Tahun 2025, tidak dilakukan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semester 2 TA 2024 (sesuai dengan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor: S-135/KN/KN.2/2024 tanggal 30 Desember 2024). Sehingga dilakukan penyesuaian target realisasi menjadi 3 Laporan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Menyusun dan menyampaikan PKT Eselon III dan IV serta menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi PKT Kepala Biro (Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) sebagai dasar pengukuran target kinerja periodik serta pelaporan realisasi rencana aksi triwulanan tahun 2025.
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) memiliki 2 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 4 indikator Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	03-Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK	[IKSK] 01-Jumlah penyedia UMKK yang on-boarding dalam sistem pengadaan digital	500 UMKK	Progres: 25.00%
2	01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa	[IKSK] 01-Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum	3 Rancangan Peraturan	Progres: 62.25%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6319.AAC.111	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1 RPP	-
2.	6319.AAH.111	Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Publik	2 Rancangan Peraturan	Progres: 90%
3.	6319.ABL.111	Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	4 Rekomendasi Kebijakan	Progres: 34.50%
4.	6323.QDG.111	Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital	500 UMKM	Progres: 25.00%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) pada bulan April 2025 adalah 37,38%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) pada bulan April 2025 adalah 38,39%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D1.1 adalah sebesar Rp3.170.255.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.170.255.000	246.887.633	7.79%	2.923.367.367
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.170.255.000	246.887.633	7.79%	2.923.367.367

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.1 di bulan April 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK – 01 - Jumlah penyedia UMKK yang on-boarding dalam sistem pengadaan digital
 - b. IKSK – 01 - Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum
 - c. RO - 6323.QDG.111 - Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital
 - d. RO - 6319.AAC.111 - Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik
 - e. RO - 6319.AAH.111 - Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
 - f. RO - 6319.ABL.111 - Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D11 sebesar Rp 2.663.865.000 atau 84,03% dari pagu awal.
3. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6323.QDG.111 Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital.
4. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp32.300.000. Realisasi ini sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp32.300.000 sehingga tidak memiliki deviasi.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Agar mempertahankan selisih RPD dengan realisasi anggaran pada ambang batas deviasi ($\pm 5\%$).
4. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus memiliki 5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 3 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa	[IKSK] 02-Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus	2 Dokumen	Progres: 40.00%
2	02-Tercapainya desa yang memiliki maturitas pengadaan	[IKSK] 01-Jumlah Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	15 Desa	Progres: 20.00%
3	03-Terselenggaranya Pendampingan PBJ Khusus dan KPBU	[IKSK] 01-Persentase proyek dengan skema KPBU yang memperoleh pendampingan	100 Persen	-
		[IKSK] 02-Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan penyusunan peraturan PBJ Khusus	100 Persen	-
		[IKSK] 03-Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan proses PBJ Khusus	100 Persen	-

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6319.AFA.124	Model Dokumen PBJ Khusus	2 NSPK	Progres: 40.00%
2	6319.BDB.123	Instansi/proyek yang mendapatkan pendampingan/diberikan pendapat dalam PBJ Khusus	5 Lembaga	1 Lembaga
3	6319.UBB.121	Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	5 Desa	Progres: 20.00%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2) pada bulan April 2025 adalah 33,00%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2) pada bulan April 2025 adalah 24,44%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D1.2 adalah sebesar Rp2.100.812.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.100.812.000	113.262.173	5.39%	1.987.549.827
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	2.100.812.000	113.262.173	5.39%	1.987.549.827

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.2 di bulan April 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKS – 01 - Persentase proyek dengan skema KPBU yang memperoleh pendampingan
 - b. IKS – 02 - Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan penyusunan peraturan PBJ Khusus
 - c. IKS – 03 - Persentase instansi/lembaga yang mendapatkan pendampingan proses PBJ Khusus
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D12 sebesar Rp1.781.612.000 atau 84,81% dari pagu awal.
3. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6319.UBB 121 - Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2.
4. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp24.900.000. Realisasi ini sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp24.900.000 sehingga tidak memiliki deviasi.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Agar mempertahankan selisih RPD dengan realisasi anggaran pada ambang batas deviasi ($\pm 5\%$).
4. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.6 DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha Dan Kerjasama Internasional memiliki 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 6 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1.	01-Meningkatnya pemanfaatan produk berkelanjutan pada sistem pengadaan	[IKSK] 01-Persentase peningkatan rencana pengadaan berkelanjutan dalam SIRUP	10 Persen	Progres: 47.00%
2.	03-Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK	[IKSK]02-Persentase peningkatan pelaku UMKK yang terlibat dalam PBJ	17 Persen	Progres: 25.00%
3.	01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa	[IKSK] 03-Jumlah rumusan kebijakan terkait pengadaan berkelanjutan	1 Dokumen	Progres: 33.00%
		[IKSK] 04-Jumlah rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kerja sama internasional	1 Rekomendasi	Progres: 32.00%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6319.PDA.131	Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah	2 Produk	Progres: 43.00%
2	6319.QDB.131	K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan	2 Lembaga	Progres: 50.00%
3	6319.PAH.131	Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan	1 Rancangan Peraturan	Progres: 33.00%
4	6319.PEC.131	Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional	2 Kegiatan	Progres: 29.00%
5	6323.QDG.131	Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	500 UMKM	128 UMKM

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/ Progres
6	6323.QDC.131	Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional	200 Orang	127 Orang

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Pengembangan Iklim Usaha Dan Kerjasama Internasional (D1.3) pada bulan April 2025 adalah 35,83%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Pengembangan Iklim Usaha Dan Kerjasama Internasional (D1.3) pada bulan April 2025 adalah 38,63%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu D1.3 adalah sebesar Rp2.598.025.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.598.025.000	151.332.153	5.82%	2.446.692.847
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	2.598.025.000	151.332.153	5.82%	2.446.692.847

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.3 di bulan April 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK – 01 - Persentase peningkatan rencana pengadaan berkelanjutan dalam SIRUP
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D1.3 sebesar Rp 2.135.973.000 atau 82,22% dari pagu awal.
3. Terdapat 6 (enam) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu:
 - a. 6319.PDA.131 - Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah
 - b. 6319.QDB.131 - K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan

- c. 6319.PAH.131 - Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan
 - d. 6319.PEC.131 - Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional
 - e. 6323.QDG.131 - Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ
 - f. 6323.QDC.131 - Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional.
4. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp24.494.000. Realisasi ini lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp30.509.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp6.015.000 atau -19,72%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.7 DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan memiliki 2 Sasaran Kegiatan dengan 8 Indikator Sasaran Kegiatan dan 2 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional	01-Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional	Laporan	3	Progres: 35%
		02-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ Nasional	Laporan	58	15
		03-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ pada K/L dan Pemda	Laporan	46	15
		04-Jumlah buku profil pengadaan barang/jasa pemerintah	Buku	1	Progres 35%
		05-Jumlah kajian pengembangan platform pengadaan nasional	Kajian	9	Progres 20%
2	04-Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan pada K/L/Pemda	01-Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan bimbingan teknis perencanaan pengadaan berbasis data pengadaan	K/L/Pemda	124	47
		02-Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan PDN minimal 95%	K/L/Pemda	324	568
		03-Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan UMKK minimal 40%	K/L/Pemda	521	615



Target telah tercapai

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6320.BAH.211	Layanan Sistem Perencanaan PBJ	Layanan	1	Progres 35%

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi /Progres
2	6320.FAE.211	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP	Laporan	4	Progres 35%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan pada bulan April 2025 adalah 35%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan pada bulan April 2025 adalah 35%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, pagu anggaran D2.1 adalah sebesar Rp1.963.356.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.963.356.000	353.958.000	18.03%	1.609.398.000
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.963.356.000	353.958.000	18.03%	1.609.398.000

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.1 di bulan April 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK):
 - 01-Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional
 - 02-Jumlah laporan *monitoring* mingguan pelaksanaan PBJ Nasional
 - 03-Jumlah laporan *monitoring* mingguan pelaksanaan PBJ pada K/L dan Pemda
 - 05-Jumlah kajian pengembangan *platform* pengadaan nasional
 - b. Rincian Output (RO):
 - 6320.BAH.211 - Layanan Sistem Perencanaan PBJ
 - 6320.FAE.211 - Rekomendasi Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja PBJP

2. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran belanja pada D2.1 sebesar Rp1,014,103,000 atau sebesar 51.65% dari pagu awal.
3. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp67.240.000,-. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp80.781.000,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp13.541.000,- atau -16,76%.
4. Terdapat kinerja yang realisasinya sampai dengan bulan April 2025 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) “Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan PDN minimal 95%” yang telah terealisasi sebanyak 554 K/L/Pemda, dari target sebanyak 324 K/L/Pemda,
 - b. Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK) “Jumlah K/L/Pemda yang mencadangkan UMKK minimal 40%” yang telah terealisasi sebanyak 598 K/L/Pemda, dari target sebanyak 521 K/L/Pemda.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
5. Terkait dengan 2 IKSK yang realisasinya telah melebihi target, agar berkoordinasi secara resmi melalui nota dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas target yang telah tercapai di bulan April 2025. Mengingat bahwa capaian ini akan menjadi catatan oleh BAPPENAS pada saat rapat monitoring dan evaluasi di tingkat Kementerian/Lembaga.

2.8 DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Sistem Pengadaan Digital (D2.2) mengampu 1 Sasaran Kegiatan dengan 2 Indikator Sasaran Kegiatan dan 1 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	02-Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional	01-Jumlah layanan pengembangan platform pengadaan nasional	Layanan	1	Progres 25%
		02-Jumlah layanan penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukung	Layanan	1	Progres 28.33%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi /Progres
1	6320.FAB.221	Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital	Layanan	1	Progres 28.33%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Sistem Pengadaan Digital pada bulan April 2025 adalah 28.33%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Sistem Pengadaan Digital pada bulan April 2025 adalah 28.33%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D2.2 adalah sebesar Rp7.521.299.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D2.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
52 Belanja Barang	7.521.299.000	1.029.137.496	13.68%	6.492.161.504
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	7.521.299.000	1.029.137.496	13.68%	6.492.161.504

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Catatan pada kinerja D2.2 di bulan April 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran belanja pada D2.2 sebesar Rp5,188,431,000 atau sebesar 68.98% dari pagu awal.
2. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp256.360.000,-. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp79.215.000,- sehingga memiliki deviasi sebesar Rp177.145.000,- atau 223,63%.
3. Terhadap Indikator Sasaran Kegiatan Jumlah layanan penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukung dan Rincian Output Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital terdapat hal perlu diperhatikan mengingat adanya kebijakan efisiensi belanja, dimana hal tersebut berpengaruh terhadap peminatan pemenuhan 17 standar pada LPSE. Dimana dalam rangka pencapaian target kinerja semula direncanakan kegiatan bimbingan teknis LPSE sebanyak 24 *batch*, menjadi 18 *batch* bimbingan teknis LPSE dalam rangka menindaklanjuti kebijakan efisiensi Presiden.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Sistem Pengadaan Digital adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.9 DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Pasar Digital Pengadaan mengampu 2 Sasaran Kegiatan dengan 2 Indikator Sasaran Kegiatan dan 2 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	02-Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional	03-Jumlah modul aplikasi integrasi pasar digital pengadaan	Modul	1	Progres 30%
2	03-Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan	01-Jumlah produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan	Produk	200.000	191.153

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	6320.FAB.231	Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi	Modul Aplikasi	1	Progres 30%
2	6323.BIA.231	Produk Hasil Kurasi pada Pasar Digital Pengadaan	Produk	200.000	191.153

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Pasar Digital Pengadaan pada bulan April 2025 adalah 32.5%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Pasar Digital Pengadaan pada bulan April 2025 adalah 30%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D2.3 adalah sebesar Rp1,909,723,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.909.723.000	393.002.870	20.58%	1.516.720.130
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.909.723.000	393.002.870	20.58%	1.516.720.130

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.3 di bulan April 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran belanja pada D2.3 sebesar Rp775,388,000 atau sebesar 40.60% dari pagu awal.
2. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp85.771.500,-. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp260.760.504,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp174.989.004,- atau -67,11%.
3. Pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan dengan indikator Jumlah produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan dan Rincian Output Produk Hasil Kurasi pada Pasar Digital Pengadaan, sampai dengan periode monitoring bulan April 2025 realisasi yang telah tercapai hampir mencapai target pada tahun 2025 yaitu 191.153 produk dari target sebanyak 200.000 produk.
4. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu 6320.FAB.231 - Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Pasar Digital Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Terkait dengan Sasaran Kegiatan dan Rincian Output yang realisasinya hampir mencapai target, agar berkoordinasi secara resmi melalui nota dinas kepada Biro

Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas target yang sampai dengan bulan April 2024 hampir tercapai. Mengingat bahwa capaian ini akan menjadi catatan oleh BAPPENAS pada saat rapat monitoring dan evaluasi di tingkat Kementerian/Lembaga.

5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.10 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (D3.1) memiliki 5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, 3 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	1-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	[IKSK] 01-Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	10.570 Orang	10.226 Orang
		[IKSK] 02-Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi okupasi	1.675 Orang	6.477 Orang
		[IKSK] 03-Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, ekosistem PBJ dan Kepala UKPBJ yang Kompeten	10 orang	107 orang
2	02-Meningkatnya kapabilitas UKPBJ	[IKSK] 01-Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3	467 UKPBJ	450 UKPBJ
		[IKSK] 02-Jumlah UKPBJ yang telah siap menajdi Pusat Keunggulan Pengadaan-Proaktif	1 UKPBJ	Progres: 25%

 Target telah tercapai

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6321.ABQ.311	Rekomendasi Kebijakan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rekomendasi Kebijakan	1	Progres : 50,50%
2.	6321.PDE.311	UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3	Lembaga	35	11 Lembaga
3.	6321.PDH.311	SDM PBJ dan Non-JF PBJ	Orang	550	206 Orang

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan pada bulan April 2025 adalah 41,83%.

4. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan pada bulan April 2025 adalah 23,45%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D3.1 adalah sebesar Rp3.539.260.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	Rp3.539.260.000	Rp181.497.935	5.13%	Rp 3.357.762.065
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	Rp3.539.260.000	Rp 181.497.935	5.13%	Rp3.357.762.065

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.1 di bulan April 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK – 02 – Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda;
 - b. IKSK – 03 – Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten; dan
 - c. RO- UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3.
2. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp31.228.000. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp34.878.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp3.650.000 atau -10,47%.
3. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D3.1 sebesar Rp3.063.811.000 atau 86,57%.
4. Terdapat 2 (satu) Rincian Output yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6321.PDE.311 UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3 dan RO 6321.PDH.311 SDM PBJ dan Non-JF PBJ.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.11 DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Sertifikasi Profesi (D3.3) memiliki 4 Indikator Kinerja Kegiatan dan 6 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4.860 Orang	2.163 Orang
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Okupasi	600 Orang	239 Orang
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kompetensi Kepala UKPBJ	20 Orang	-
		Indeks Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi PBJ	70 Indeks	Progres : 15 %

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi /Progres
1	6321.ADD.331	Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar	Lembaga	5	2
2	6321.ADG.331	Asesor yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	75	Progres: 35%
3	6321.ADI.331	Peserta Sertifikasi SDM PBJ	Orang	5.480	2.402
4	6321.AFA.331	Pedoman Sertifikasi PBJP	Pedoman	1	Progres : 60%
5	6321.AFA.332	Materi Uji Sertifikasi PBJP	NSPK	20	4
6	6321.CCL.331	Sarana Sertifikasi PBJP	Unit	196	64

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Sertifikasi Profesi pada bulan April 2025 adalah 43.33%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Sertifikasi Profesi pada bulan April 2025 adalah 43.33%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan pagu awal Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, pagu anggaran D3.3 adalah sebesar Rp3.708.029.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.708.029.000	505.595.120	13.64%	3.202.433.880
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.708.029.000	505.595.120	13.64%	3.202.433.880

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.3 di bulan April 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D3.3 sebesar Rp2.321.421.000 atau 62,61%.
2. Pada IKSK Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kompetensi Kepala UKPBJ dan Indeks Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi PBJ belum dilaksanakan uji kompetensi Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kompetensi Kepala UKPBJ. Tahun ini ditargetkan penyusunan perangkat sertifikasinya terlebih dahulu, Sehingga pada tahun 2025 target ini diusulkan di hapus.
3. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp87.168.750,-. Realisasi ini lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp Rp99.691.781,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp12.523.031,- atau -12,56%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Guna tetap meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga khususnya dalam penyerapan anggaran, BPKeu mengkoordinasikan seluruh unit organisasi agar terus memperhatikan delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.12 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat (D4.1) memiliki 4 Indikator Kinerja Kegiatan dan 3 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	02-Terselenggaranya Konsolidasi, Probity Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	01-Jumlah kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh K/L	2 Kegiatan	Progres: 33%
		02-Jumlah kegiatan probity advice dan/atau advokasi yang dilakukan kepada K/L	14 Kegiatan	1 Kegiatan
2	03-Terselenggaranya <i>clearing house</i> pengadaan yang efektif	01-Jumlah K/L yang mengimplementasikan/ menyelenggarakan <i>clearing house</i> pengadaan	56 K/L	51 K/L
3	02-Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pemberdayaan UMKK	01-Jumlah K/L yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ	68 K/L	2 K/L

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	6323.FAI.411	Kementerian/ Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	K/L	68	2
2	6322.FAI.412	Kementerian/ Lembaga yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan <i>Clearing House</i>	K/L	20	1
3	6322.FAI.413	Kementerian/ Lembaga yang Mendapatkan <i>Probity Advice</i> , Konsolidasi dan/atau Advokasi	K/L	16	1

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat pada bulan April 2025 adalah 33,33%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat pada bulan April 2025 adalah 33,29%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D4.1 adalah sebesar Rp 1.944.566.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.944.566.000	68.780.871	3,54%	1.875.785.129
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.944.566.000	68.780.871	3,54%	1.875.785.129

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.1 di bulan April 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - 01 - Jumlah kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh K/L;
 - 02 - Jumlah kegiatan *probity advice* dan/atau advokasi yang dilakukan kepada K/L;
 - 01 - Jumlah K/L yang mengimplementasikan/ menyelenggarakan *clearing house* pengadaan;
 - 01 - Jumlah K/L yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ;
 - b. Rincian Output
 - 411 - Kementerian/ Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ;
 - 412 - Kementerian/ Lembaga yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan *Clearing House*; dan
 - 413 - Kementerian/ Lembaga yang Mendapatkan *Probity Advice*, Konsolidasi dan/atau Advokasi.

2. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial) sebesar Rp5.775.495,-. Realisasi ini sama dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp5.775.495,- sehingga memiliki deviasi sebesar Rp 0 atau 0%.
3. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D4.1 sebesar Rp1.799.078.000 atau sebesar 92,52% dari pagu awal.
4. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan yang merupakan indikator dengan capaian berlanjut dari tahun 2024 yaitu 01-Jumlah K/L yang mengimplementasikan/ menyelenggarakan *clearing house* pengadaan dengan capaian 50 K/L pada tahun 2024.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Agar mempertahankan selisih RPD dengan realisasi anggaran pada ambang batas deviasi ($\pm 5\%$).
4. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.13 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2025, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (D4.2) memiliki 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 3 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	02-Terselenggaranya Konsolidasi, Probitry Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	03-Jumlah kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh Pemda	40 Kegiatan	7 Kegiatan
		04-Jumlah kegiatan <i>probitry advice</i> yang dilakukan di Pemda	27 Kegiatan	Progres: 0%
		05-Jumlah Kegiatan Advokasi yang dilakukan di Pemda	150 Kegiatan	21 Kegiatan
2	03-Terselenggaranya <i>clearing house</i> pengadaan yang efektif	02-Jumlah Pemda yang mengimplementasikan/menyelenggarakan <i>clearing house</i>	120 Pemda	106 Pemda
3	02-Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pemberdayaan UMKK	02-Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ	100 Pemda	16 Pemda

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	6323.FAI.421	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	Pemda	100	16
2	6322.FAI.422	Pemda yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan <i>Clearing House</i>	Pemda	20	6
3	6322.FAI.423	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan <i>Probitry Advice</i> , Konsolidasi dan/atau Advokasi	K/L	150	21

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah pada bulan April 2025 adalah 20%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah pada bulan April 2025 adalah 33,7%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D4.2 adalah sebesar Rp 3.060.763.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.989.263.000	50.819.082	1,7%	2.938.443.918
53 Belanja Modal	71.500.000	-	-	71.500.000
Total	3.060.763.000	50.819.082	1,7%	2.938.443.918

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.2 di bulan April 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:
 - 03 - Jumlah kegiatan konsolidasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
 - 04 - Jumlah kegiatan *probity advice* yang dilakukan di Pemerintah Daerah
 - 05 - Jumlah Kegiatan Advokasi yang dilakukan di Pemerintah Daerah
 - 02- Jumlah Pemerintah Daerah yang mengimplementasikan/ menyelenggarakan *clearing house* pengadaan
 - 02 - Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK dalam proses PBJ
 - b. Rincian Output
 - 421 - Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ
 - 422 - Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan *Clearing House*
 - 423 - Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Probity Advice, Konsolidasi dan/atau Advokasi

2. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial) sebesar Rp6.225.500,-. Realisasi ini sama dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp6.225.500,-sehingga memiliki deviasi sebesar Rp 0 atau 0%.
3. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D4.2 sebesar Rp Rp2.914.139.000 atau sebesar 95,21% dari pagu awal.
4. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan yang merupakan indikator dengan capaian berlanjut dari tahun 2024 yaitu “Jumlah Pemda yang mengimplementasikan/menyelenggarakan *clearing house*” dan dengan capaian 100 Pemda pada tahun 2024.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Agar mempertahankan selisih RPD dengan realisasi anggaran pada ambang batas deviasi ($\pm 5\%$).
4. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.14 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (D4.3) memiliki 5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 5 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan	01-Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan	2 K/L/Pemda	1 K/L/Pemda
2	04-Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ	01-Persentase layanan PKA yang Optimal*	30 Persen	32,52 Persen
		02-Persentase layanan LPS yang Optimal*	30 Persen	71,52 Persen
		03-Persentase layanan penanganan pengaduan yang optimal*	30 Persen	45 Persen
		04-Jumlah instansi/ <i>stakeholder</i> yang mendapatkan pembinaan dalam dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ	4 Lembaga	1 Lembaga

Keterangan:

*) Realisasi indikator akan terus berubah setiap bulannya dengan nilai final pada bulan Desember 2025



Target telah tercapai

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6322.FAI.431	Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak	Lembaga	4	1
2	6322.BCE.431	Perkara/Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani	Perkara	500	92
3	6322.UAI.431	K/L/Pemda Yang Terbangun Kapabilitas Untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan	Lembaga	2	1
4	6322.BCE.432	Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang berkualitas	Perkara	25	5

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
5	6322.BCE.433	Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal	Perkara	400	139

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum pada bulan April 2025 adalah 38,8%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum pada bulan April 2025 adalah 46%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D4.3 adalah sebesar Rp 1.984.221.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif) penyerapan per jenis belanja pada D4.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.984.221.000	137.311.116	6,92%	1.846.909.884
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.984.221.000	137.311.116,00	6.92%	1.846.909.884,00

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.3 di bulan April 2025 adalah sebagai berikut:

- Terdapat rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - RO – 431 - Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak;
 - RO - 432 - Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang berkualitas;
 - RO - 433 - Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal; dan
 - RO – 431 - Perkara/Permasalahan PBJ yang Terlayani.
- Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial) sebesar Rp24.088.000,-. Realisasi ini sama dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp24.088.000,- sehingga memiliki deviasi sebesar Rp 0,- atau 0%.

3. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D4.3 sebesar Rp Rp1.667.207.000 atau 84,02% dari pagu awal.
4. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6322.UAI.431 K/L/Pemda Yang Terbangun Kapabilitas Untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan.
5. Terdapat 2 (dua) RO yang merupakan RO baru berdasarkan konsep rancangan awal Renstra LKPP dan masih dalam penyesuaian dokumen anggaran yaitu:
 - a. 6322.BCE.433 - Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal; dan
 - b. 6322.BCE.432 - Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang berkualitas.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Agar mempertahankan selisih RPD dengan realisasi anggaran pada ambang batas deviasi ($\pm 5\%$).
4. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.15 INSPEKTORAT

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Inspektorat memiliki 4 Indikator Kinerja Kegiatan dan 2 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/ Progres
1.	01-Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi	Persentase Pemenuhan Kapabilitas APIP pada Level 4	33.33 persen	Progres: 32%
		Indeks Pengelolaan Integritas	Predikat: Cukup	Progres: 25%
		Persentase Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	72 Persen	Progres: 20%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan	80 Persen	Progres: 40%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	5664.EBA.962	Layanan Umum	Dokumen	9	Progres: 30%
2	5664.EBA.965	Layanan Audit Internal	Dokumen	12	Progres: 30%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Inspektorat pada bulan April 2025 adalah 30%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Inspektorat pada bulan April 2025 adalah 20%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, pagu anggaran Inspektorat adalah sebesar Rp927.860.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Inspektorat sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	927.860.000	71.575.399	7.71%	856.284.601
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	927.860.000	71.575.399	7.71%	856.284.601

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Terdapat beberapa catatan pada Inspektorat di bulan April 2025 sebagai berikut:

1. Pada Komponen- 052-Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Kegiatan ditiadakan karena dikeluarkannya kebijakan Inpres 1 Tahun 2025 Perihal Efisiensi Anggaran K/L/PD. Output kegiatan tidak dapat direalisasikan karena untuk mencapai output yang ditargetkan dibutuhkan anggaran.
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir efisiensi pada Inspektorat sebesar Rp811.811.000 atau 87,49%.
3. Pada Komponen Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Kegiatan ditiadakan karena dikeluarkannya kebijakan Inpres 1 Tahun 2025 Perihal Efisiensi Anggaran K/L/PD Output kegiatan tidak dapat direalisasikan karena untuk mencapai output yang ditargetkan dibutuhkan anggaran.
4. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp11.212.000,-. Realisasi ini sama dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp11.212.000,- sehingga memiliki deviasi sebesar Rp 0,- atau 0%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Agar mempertahankan selisih RPD dengan realisasi anggaran pada ambang batas deviasi ($\pm 5\%$).
5. Guna tetap meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga khususnya dalam penyerapan anggaran, BPKu mengkoordinasikan seluruh unit organisasi agar terus memperhatikan delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP

dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.

6. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.16 PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa memiliki 6 Indikator Kinerja Kegiatan dan 7 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	04- Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional PBJ	1.300 Orang	221 Orang
		05- Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PBJ	12.000 Orang	2.529 Orang
		03- Jumlah Peserta Pelatihan Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ	1.110 Orang	351 Orang
		04- Jumlah Peserta Pelatihan Tematik PBJ	12.110 Orang	4.071 Orang
		08- Jumlah Peserta Pelatihan Anti Korupsi PBJ	200 Orang	108 Orang
		09- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural SDM PBJ	400 Orang	48 Orang

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6321.CAA.511	Media Pembelajaran Berbasis TIK	Paket	5	Progres: 27%
2	6321.DCF.511	Peserta Pelatihan PBJ	Orang	16.000	4.762 Orang
3	6321.DCF.512	SDM yang Mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ	Orang	400	48 Orang
4	6321.FAE.511	Laporan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan PBJ	Laporan	5	Progres: 36%
5	6321.SCF.511	Peserta Pelatihan Anti Korupsi	Orang	200	108 Orang
6	6321.AFA.511	Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ	NSPK	5	Progres: 16%
7	6321.AFA.511	Pedoman Pelatihan PBJ	Pedoman	4	Progres: 40%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa pada bulan April 2025 adalah 29,57%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa pada bulan April 2025 adalah 28,55%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, pagu anggaran Puslat SDM PBJ adalah sebesar Rp3.768.782.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada Puslat PBJ sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.295.782.000	247.358.697	7.51%	3.048.423.303
53 Belanja Modal	473.000.000	-	-	473.000.000
Total	3.768.782.000	247.358.697	6.56%	3.521.423.303

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdiklat di bulan April 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur pasca efisiensi yaitu:
 - a. IKSK-04-Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional PBJ
 - b. IKSK-05-Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PBJ
 - c. IKSK-07-Jumlah Peserta Pelatihan Tematik PBJ
 - d. RO- Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ
 - e. RO-Media Pembelajaran Berbasis TIK
 - f. RO-Peserta Pelatihan PBJ
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir efisiensi pada Puslat sebesar Rp3.088.033.000 atau 81,93%.
3. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp34.165.383. Realisasi ini sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp46.450.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp12.284.617 atau -26,45%.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

2.17 PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)

A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 23 Tahun 2025, Pusat Data Dan Informasi (PUSDATIN) memiliki 1 Indikator Kinerja Kegiatan dan 4 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/ Progres
1.	01-Terwujudnya Layanan Data yang Informatif	Nilai Indeks Pembangunan Statistik	Indeks 2,9	Progres: 33.33%
		Persentase Pemenuhan Data Prioritas	100 Persen	Progres: 33.33%
2.	02- Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ	Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi manajemen perkantoran	30 Persen	Progres: 33.33%
		Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	30 Persen	Progres: 25%
		Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi manajemen perkantoran	100 Persen	Progres: 33.33%
		Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100 Persen	Progres: 33.33%
3.	03-Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif	Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran	100 Persen	Progres: 32.70%
		Persentase Ketersediaan Layanan Komputasi	100 Persen	Progres: 32.70%
		Predikat Cyber Security Maturity (CSM)	Indeks 4,2	Progres: 30%
		Persentase Insiden Keamanan Informasi yang ditangani	85 Persen	Progres: 33.33%
4.	Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel	Predikat SAKIP Pusdatin	Nilai: 65	Progres: 33.33%
		Nilai Indeks SPBE	Nilai: 3,7	Progres: 33.33%
		Hasil Survei Kepuasan Layanan Pusdatin	Nilai: 3,2	Progres: 33.33%

2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	7033.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	Progres: 33.33%
2	7033.BMA.963	Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	Layanan	1	Progres: 33.33%
3	7033.CCL.963	Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	16	Progres: 32.70%
4	7033.FAB.963	Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sistem Informasi	5	Progres: 33.33%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Pusat Data Dan Informasi pada bulan April 2025 adalah 33,17%.

3. Komponen

Rata-rata progres komponen Pusat Data Dan Informasi pada bulan April 2025 adalah 33,12%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran Pusdatin TA 2025 adalah sebesar Rp9.118.948.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan April 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Pusdatin sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	7.742.163.000	1.305.376.537	16.86%	6.436.786.463
53 Belanja Modal	1.376.785.000	-	-	1.376.785.000
Total	9.118.948.000	1.305.376.537	14.31%	7.813.571.463

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdatin di bulan April 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat indikator sasaran kegiatan dan rincian output yang diusulkan penyesuaian target/nomenklatur berdasarkan konsep Renstra baru yaitu:
 - a. IKSK - Nilai Indeks Pembangunan Statistik
 - b. IKSK - Persentase Pemenuhan Data Prioritas

- c. IKSK - Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi manajemen perkantoran
 - d. IKSK - Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - e. IKSK - Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi manajemen perkantoran
 - f. IKSK - Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - g. IKSK - Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran
 - h. IKSK - Persentase Ketersediaan Layanan Komputasi
 - i. IKSK - Indeks Cyber Security Maturity (CSM)
 - j. IKSK - Persentase Insiden Keamanan Informasi yang ditangani
 - k. IKSK - Nilai SAKIP Pusdatin
 - l. IKSK - Indeks SPBE
 - m. IKSK - Hasil Survei Kepuasan Layanan Pusdatin
 - n. RO - Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - o. RO - Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Pada bulan April 2025, realisasi anggaran parsial) sebesar Rp96.257.300,-. Realisasi ini sama dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp96.257.300,- sehingga memiliki deviasi sebesar Rp 0,- atau 0%.
 3. Berdasarkan revisi anggaran ke-6, terdapat anggaran blokir efisiensi pada BHU sebesar Rp6.192.894.000 atau 67,91% dari pagu awal.
 4. Pada IKSK-Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran Diperlukan penambahan bandwidth untuk mengakomodir penggabungan jaringan D22 ke jaringan pusdatin- Pasca peralihan jaringan virtual private network D22 tidak dapat terhubung, diperlukan konfigurasi

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
3. Agar mempertahankan selisih RPD dengan realisasi anggaran pada ambang batas deviasi ($\pm 5\%$).
4. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).

5. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

BAB III KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi periode bulan April 2025, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran, saat ini Rancangan Renstra LKPP Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renja LKPP Tahun 2025 sedang dalam tahap penyesuaian sehingga pelaporan kinerja LKPP sampai dengan April 2025 pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian Output berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja LKPP Tahun 2025.
2. Pada tahun 2025, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp166.711.994.000 dan sampai dengan bulan April 2025 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp35.181.188.475 (21.10%) yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	65.901.318.000	21.046.972.571	31.94%	44.854.345.429
52 Belanja Barang	98.714.391.000	14.069.142.154	14.25%	84.645.248.846
53 Belanja Modal	2.096.285.000	65.073.750	3.1%	2.031.211.250
TOTAL	166.711.994.000	35.181.188.475	21.10%	131.530.805.525

3. Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 beserta rincian nilai efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, nilai efisiensi anggaran LKPP adalah Rp49,578 M atau 29,75% dari pagu awal LKPP pada tahun 2025.
4. Sesuai Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 5975/KPA/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 Perihal Pemanfaatan Anggaran Konsolidasi Selama Masa Efisiensi, disampaikan beberapa hal terkait pemanfaatan anggaran efektif pasca efisiensi yang dipusatkan/dikonsolidasikan di lingkup Unit Organisasi di bawah Sekretariat Utama, yang dapat digunakan oleh seluruh Unit Organisasi di LKPP sesuai dengan syarat dan pedoman yang telah ditentukan.
5. Nilai IKPA LKPP bulan April 2025 berdasarkan Aplikasi OMSPAN (spanint.kemenkeu.go.id) adalah sebesar 94,22.

6. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan gabungan dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan bobot masing-masing indikator sebesar 50%. Mulai tahun 2024, pelaporan capaian Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi salah satu komponen penilaian pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran hanya dilaporkan setiap akhir tahun melalui aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan, oleh karena itu NKA LKPP belum dapat disajikan pada laporan bulanan ini.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Periode April 2025, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran belanja pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran kepada Biro Perencanaan dan Keuangan.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ($\pm 5\%$).
4. Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dari Kementerian PANRB, setiap unit organisasi agar mengoptimalkan aplikasi SiREMOM dan menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan baik level lembaga maupun seluruh unit/ satuan kerja dengan mendorong pemanfaatan fitur “arahan dan diskusi”. Pimpinan dapat memberikan *feedback*/rekomendasi langkah strategis yang perlu dilakukan atas permasalahan yang muncul dalam upaya pelaksanaan kinerja oleh unit organisasi sebagai bentuk pelaksanaan dialog kinerja, sehingga unit organisasi mendapat arahan yang jelas dan dapat merumuskan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan sesuai arahan pimpinan untuk mengatasi permasalahan dan mendorong pencapaian kinerja.
5. PIC Pelaporan setiap unit organisasi agar melaporkan capaian kinerja dan anggaran serta bukti dukung pada aplikasi SiREMOM secara berkala.

